

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TIDAK MENDORONG PENINGKATAN BELANJA
MODAL SECARA PROPORSIONAL
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI



**Nama : Diah Ayu Lestari
NIM : 222015255**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TIDAK MENDORONG PENINGKATAN BELANJA
MODAL SECARA PROPORSIONAL
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Diah Ayu Lestari
NIM : 222015255**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

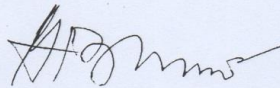
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor Penyebab Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tidak Mendorong Peningkatan Belanja Modal Secara Proporsional (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan)
Nama : Diah Ayu Lestari
NIM : 22 2015 255
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

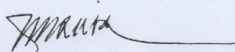
Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

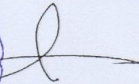


H.M. Basvaruddin, R. S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM: 0003055605/784024



Mizan, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Prodi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Ayu Lestari

NIM : 22 2015 255

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakkan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis



Diah Ayu Lestari

ABSTRAK

Diah Ayu Lestari/222015255/2019/Analisis Faktor Penyebab Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tidak Mendorong Peningkatan Belanja Modal Secara Proporsional (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Pendapatan Asli Daerah meningkat sementara Belanja Modal tidak meningkat secara Proporsional. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor penyebab peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak mendorong peningkatan Belanja Modal secara Proporsional. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Peningkatan PAD terjadi karena sumber-sumber PAD yang sudah berjalan dengan maksimal yakni penarikan pajak daerah, retribusi daerah dan sektor pasar telah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga sistem pengelolaan komponen PAD berjalan dengan optimal. Sedangkan Faktor Faktor yang menyebabkan Belanja Modal turun atau rendah di beberapa kab/kota provinsi sumatera selatan yaitu bahwa tidak adanya penggunaan sumberdaya yang efisien dan efektif, berbagai fasilitas yang di sediakan tidak dapat dioptimalkan kemanfaatannya, serta adanya keterlambatan pengajuan anggaran dari batas waktu yang ada seperti pengadaan barang dan lain sebagainya serta minimnya serapan anggaran.

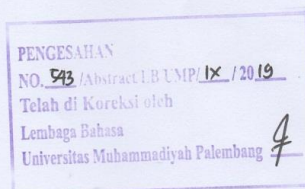
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Abstract

Diah Ayu Lestari / 222015255/2019 / The Analysis of Factors That Cause An Increase in Local Own Revenue Does Not Encourage a Capital Expenditure Increase Proportionally (Study at Regional Government, District or City of South Sumatra Province) / Public Sector Accounting

The formulation of the problem in this study was why the Regional Revenue has increased while Capital Expenditures have not increased proportionally. The purpose of this research was to find out the factors that cause an increase in Regional Original Income did not encourage an increase in proportionally Capital Expenditures. This type of research was descriptive research. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency. The data was used primary data and secondary data. The variables were used Local Revenue and Capital expenditure. The data collection techniques were used interviews and documentation. The result of this study showed that there were an increase in component source of PAD because the sources of PAD that have been running optimally; local tax collection, regional levies and the market sector have reached the targets set so that the PAD component management system ran optimally. Meanwhile, the factors that caused Capital Expenditures to fall or were low in several districts / cities of South Sumatra Province were that there was no efficient and effective use of resources, the various facilities provided could not be utilized optimally, and there were delays in filing the budget from the existing deadline such as procurement of goods and others and the lack of limited fund budget.

Keywords: Regional Original Revenue and Capital Expenditures



PRAKATA



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tidak Mendorong Peningkatan Belanja Modal Secara Proporsional (Studi pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan), sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pembangunan daerah dalam era reformasi sangat penting dilaksanakan dan perlu ditingkatkan, begitu pula dengan pembangunan ekonomi, karena kedua hal tersebut merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional. Sehingga tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah Pemerintah daerah (pemda) menggali potensi daerah dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dalam jumlah besar, juga harus diikuti akuntabilitas yang lebih baik, memperbaiki pembiayaan daerah dan dapat memperkecil sumber

pendanaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Dengan adanya peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah, diharapkan dapat meningkatkan anggaran Belanja Modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan rezeki dan nikmat baik kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis dan kedua orang tuaku yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan senantiasa memberikan semangat, dan dukungan serta doa yang tiada hentinya bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak H.M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si dan Bapak Mizan, S.E., M.Si, Ak, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus dan ikhlas. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR.H.Abid Djazuli, SE.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.

2. Bapak Drs.H.Fauzi Ridwan SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku Wakil Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

Diah Ayu Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xii
ABSTRACK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Landasan Teori	16
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	16

2. Pendapatan Asli Daerah	18
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	18
b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	19
3. Belanja Modal.....	20
a. Pengertian Belanja Modal	20
b. Jenis-jenis Belanja Modal	21
c. Peran Belanja Modal	24
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal	25
B. Penelitian Sebelumnya	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Operasionalisasi Variabel	33
D. Data yang diperlukan	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	35
1. Analisis Data	35
2. Teknik Analisis	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
C. Pembahasan Faktor Penyebab PAD Meningkat Tapi Belanja Modal Menurun	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Realisasi PAD dan Belanja Modal 2014-2017	5
Tabel II.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	30
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	33
Tabel IV.1 Data Realisasi PAD tahun 2014-2017	54
Tabel IV.2 Data Realisasi Belanja Modal 2014-2017	56
Tabel IV.3 Data Pertumbuhan PAD dan Belanja Modal	58
Tabel IV.4 Data PAD dan Belanja Modal kab. Musi Rawas	61
Tabel IV.5 Data PAD dan Belanja Modal kab. Muara Enim	63
Tabel IV.6 Data PAD dan Belanja Modal kab. OKI	65
Tabel IV.7 Data PAD dan Belanja Modal kota Prabumulih.....	66
Tabel IV.8 Data PAD dan Belanja Modal kab. Banyu Asin	68
Tabel IV.9 Data PAD dan Belanja Modal kab. OKU Timur.....	70
Tabel IV.10 Data PAD dan Belanja Modal kab.OKU Selatan	71
Tabel IV.11 Data PAD dan Belanja Modal kab. Muratara.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi	46
Gambar IV.2 Diagram Pertumbuhan PAD Prov. Sumsel.....	55
Gambar IV.3 Diagram Pertumbuhan Belanja Modal Prov. Sumsel.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembaran Persetujuan Skripsi

Lampiran 2 Checker X Originally Report Surat

Lampiran 3 Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 5 Fotocopy sertifikat AIK

Lampiran 6 Fotocopy sertifikat Toefl

Lampiran 7 Biodata

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah dalam era reformasi sangat penting dilaksanakan dan perlu ditingkatkan, begitu pula dengan pembangunan ekonomi, karena kedua hal tersebut merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional. Sehingga tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah (pemda) menggali potensi daerah dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dalam jumlah besar, juga harus diikuti akuntabilitas yang lebih baik, memperbaiki pembiayaan daerah dan dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Setiap daerah memiliki tingkat kemandirian daerah dan kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Menurut Sujarweni (2015; 60) Anggaran pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan di pungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2014 pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Sumber-sumber PAD.

APBD sebagaimana yang ada dalam Pasal 1 Ayat (17) UU No. 33 Tahun 2004, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas

dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, untuk menjalankan pemerintahan diharuskan menyusun rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun ke depan, dan harus adanya tujuan tertentu. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Tiga komponen APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Jika komponen ini dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian daerah.

Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksana berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Dengan adanya peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah, diharapkan dapat meningkatkan anggaran Belanja Modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Halim dan Kusufi, 2012:118). Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, di beberapa daerah peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal karena pendapatan asli daerah banyak terpakai untuk belanja operasi lain dan lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan

memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah.

Eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah dan legislatif selaku lembaga wakil rakyat harus mampu menyusun anggaran yang ekonomis, efisien dan efektif. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran tidak lagi didasarkan pada prinsip *incremental*, Prinsip ini bahwa keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih antara nilai dengan suatu alternatif dan nilai tanpa alternatif tersebut dan sebagai tambahan atau keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan *incremental cost* atau biaya tambahan, namun harus berorientasi kepada kinerja, sehingga setiap pengalokasian anggaran yang dikeluarkan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik. Adapun data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel.1.1 berikut.

Tabel I.1
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal
Kabupaten / Kota Sumatera Selatan Tahun 2014-2017
(Dalam Rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun	PAD	Belanja Modal
1.	Kab Musi Rawas	2014	120.152.665	413.464.154
		2015	97.998.166	448.822.421
		2016	96.743.870	432.324.100
		2017	151.594.082	317.467.274
2.	Kab. Muara Enim	2014	138.705.896	634.278.880
		2015	178.245.088	600.742.048
		2016	150.912.522	566.871.495
		2017	226.929.233	530.346.575
3.	Kab. Ogan Komerling Ilir	2014	145.590.658	444.998.104
		2015	110.225.039	474.153.706
		2016	108.992.378	560.990.403
		2017	222.961.997	473.963.601
4.	Kota Prabumulih	2014	64.169.588	351.248.242
		2015	72.236.033	299.372.657
		2016	86.253.193	228.274.659
		2017	119.192.660	162.394.102
5.	Kab. Banyu Asin	2014	106.917.589	653.602.575
		2015	96.219.655	439.408.057
		2016	104.218.245	368.488.105
		2017	125.984.368	303.104.686
6.	Kab. OKU Timur	2014	62.418.322	238.864.441
		2015	64.280.630	207.580.658
		2016	69.357.438	321.249.671
		2017	77.706.784	291.446.226
7.	Kab. OKU Selatan	2014	33.663.401	326.392.866
		2015	38.197.172	327.452.630
		2016	35.696.934	373.153.188
		2017	89.506.598	292.933.440
8.	Kab. Musi Rawas Utara	2014	21.349.935	355.726.260
		2015	29.172.475	317.372.259
		2016	32.174.860	355.012.452
		2017	57.580.992	279.488.044

Sumber : Data yang di olah dari DJPK

Berdasarkan tabel I.I diatas menunjukkan bahwa terdapat 8kabupaten yang secara keseluruhanrealisasi Pendapatan Asli Daerah ini mengalami peningkatan namun tidak di ikuti dengan peningkatan belanja modal, di belanja modal malah mengalami penurunan bukannya meningkat malah cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun.Permasalahan lain yang

terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan untuk Belanja Modal belum mencapai 30 Persen sesuai ketentuan Pedoman Penyusunan APBD yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut **detikperistiwa.com**. Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Musi Rawas menjadi permasalahan serius bagi masyarakat, khususnya Pemkab Musi Rawas. Sebab jalan dibangun dengan menggunakan APBD Kabupaten Musi Rawas ini, tiap tahun mengalami kerusakan yang cukup parah. Indikasi kerusakan ini diakibatkan kendaraan yang melebihi muatan (Tonase) untuk kapasitas khususnya kendaraan yang mengangkut Tandem Buah Segar (TBS) kelapa sawit baik yang dimiliki perusahaan maupun masyarakat. Untuk membangun jalan ini tidak sedikit anggaran daerah di kucurkan melalui APBD sehingga jalan ini dapat dilalui dengan baik dan lancar oleh masyarakat. Jika dikalkulasikan sejak 10 tahun terakhir, lebih dari Rp 3 triliun anggaran diserap untuk infrastruktur jalan ini. (detikperistiwa.com)

Menurut **Transformasinews.com** Akhir-akhir ini banyak pembangunan proyek infrastruktur di Kota Prabumulih yang terkesan mengecewakan dan mencuat di permukaan publik. Di antaranya adalah pengerjaan Islamic Center, lampu penerangan jalan lingkar tenaga surya yang hanya beroperasi 6 bulan, serta pembangunan Gor Kota Prabumulih di jalan lingkar yang menelan dana sudah hampir 100 milyar, namun hingga sekarang tak kunjung

selesai. Belum lagi soal pelebaran jalan dan marka trotoar jalan dalam kota yang sudah menghabiskan sekitar Rp. 40 milyar, tetapi kualitas di lapangan dinilai sangatlah buruk. Pasar Gunung Ibul dan taman Gunung Ibul yang menggunakan uang rakyat hingga milyaran rupiah. Gedung serbaguna Tanjung Taman, tugu nanas yang hancur, pasar modern 1 yang kualitasnya tidak baik dan banjir, pasar modern 2 yang tidak jelas status dan kualitasnya. Penyebab bobroknnya berbagai proyek infrastruktur di Kota Prabumulih tersebut, sumber media online menunjukkan, diduga kuat karena keterbatasan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Serta dalam hal kompetensi terdapat beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ada di SKPD belum memiliki kompetensi yang memadai dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Dimana masih kurangnya pemahaman PPTK terhadap rencana kerja dan syarat-syarat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Menurut **Sumsel,86News.co**. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Afrizal menilai visi bupati OKU Timur yang saat ini dinahkodai oleh Kholid Mawardi dan Feri Antoni belum dapat dirasakan oleh masyarakat dan hanya menjadi slogan kosong. HMI Cabang OKU Timur menilai, dalam hal pembangunannya, masih ada yang belum maksimal. “Kita mengapresiasi, namun dalam hal ini memang masih ada hal-hal yang harus dipertanyakan, sebab faktanya, baru beberapa bulan selesai dibangun, infrastruktur disini, sudah rusak kembali.” Tambah Afrizal. Tidak hanya itu, HMI OKU Timur juga, sambung Afrizal

menambahkan, dengan jumlah Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) kabupaten OKU Timur yang sangat terbata, Pemerintah Daerah dan DPRD OKU Timur, justru lebih fokus membenahi jalan nasional, yang notabenehnya bukan bagian dari kewenangan daerah. “Meskipun secara prosedural sah, tetapi secara kontekstual bukan menjadi prioritas pembangunan di OKU Timur. Masih banyak infrastruktur jalan dan jembatan di OKU Timur yang rusak dan memprihatinkan yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah,” tambah Afrizal.

Menurut **RMOL.com** Sejak berdiri tiga tahun lalu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dikategorikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) sebagai kawasan daerah tertinggal. Kepala Bappeda Muratara, Erwin Syarif menjelaskan, saat ini mereka fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dulu yakni jalan, jembatan, air bersih, dan listrik serta pelayanan dasar utamanya dibidang pendidikan dan kesehatan. Selain di pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus Pemkab Muratara karena masih ada aparatur desa yang rendah kualitasnya. Hal itu juga yang menyebabkan daerah tertinggal karena pelayanan yang rendah pula akibat ketidaktahuan. Untuk peningkatan SDM ini juga dilakukan berbagai pelatihan manajemen dan administrasi desa agar mereka mengerti

Menurut **Monitor.Com** Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak parah di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dipertanyakan banyak pihak. Pasalnya,

Kabupaten Muba adalah salah satu kabupaten terkaya tidak hanya di Sumsel, bahkan di Indonesia. Tahun 2018 APBD Muba tembus Rp 3 Triliun. Keuangan Muba makin berlimpah lantaran awal 2018 lalu, Bupati Muba Dodi Reza Alex meminjam (berhutang) kepada PT SMI sekitar Rp 400 miliar. Artinya total anggaran Muba sebesar Rp. 3,4 Triliun, Pertanyaannya di kemanakan uang sebesar itu? Mengapa justru infrastruktur jalan dan jembatan di Muba masih banyak yang rusak parah. Belum lagi masalah kemiskinan yang masih tinggi. Data BPS 2017 menyebutkan, Muba masuk dalam 3 kabupaten paling miskin di Sumsel bersama Muratara dan Lahat. Pengamat kebijakan publik, DR. Tareh Rasyid menilai, kondisi buruknya infrastruktur jalan di Muba yang menjadi perbincangan publik belakangan ini merupakan realitas atau fakta yang tidak bisa dibantah. Terlebih di era keterbukaan informasi dan jejaring media sosial (medsos) yang sulit dikendalikan oleh siapapun.

Menurut **Sripoku.com**. Jalan merupakan infrastruktur utama untuk mempermudah warga sebagai akses penghubung antara satu daerah ke daerah lainnya. Seperti jalan lintas Provinsi di Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan menuju Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan kondisi sangat memprihatinkan. "Memang sempat dilakukan pengecoran sampai wilayah perbatasan akibat cuaca musim penghujan ditimpa longsor kondisi jalan makin buruk hanya menyisahkan tanah kuning,"ungkap Dia. Rabu (14/3/2018) Seperti jalan lintas Provinsi di Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan

menuju Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan kondisi sangat memprihatinkan.

Presentasi belanja modal terjadi penurunan yang signifikan dalam beberapa terakhir yakni tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2014. Hal ini berarti pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mencapai target yang ditentukan dari pemerintah pusat agar presentasi belanja modal harus terus ditingkatkan sebesar 30% tersebut. Kenyataannya yang terjadi pada tahun 2017 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mengalami rata-rata penurunan sebesar 16,63 % tahun 2016 dan pada tahun 2017 39,80 %. Hal ini disebabkan karena masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, dari pada belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di mata masyarakat. Dengan demikian pertumbuhan kinerja keuangan daerah belum berjalan optimal karena belanja modal erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, karena belanja modal yang besar merupakan cerminan dari pembangunan melalui infrastruktur dan sarana yang dibangun.

Menurut (Halim, Abdul 2001). Semakin besar Pendapatan Asli Daerah Daerah Maka Belanja Daerah Juga semakin besar. Jika Pendapatan Asli Daerah rendah maka Belanja Daerah juga akan rendah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Abdullah dan Nazry (2015) bahwa komponen utama dari penerimaan daerah yaitu pendapatan yang dapat berasal dari pendapatan asli

daerah (PAD) dan dana perimbangan yang akan sangat menentukan besaran belanja modal. Pendapatan yang semakin meningkat dalam jumlah yang besar, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah pun semakin lebih tinggi. Naik atau turunnya pertumbuhan pendapatan asli daerah, sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pajak, retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan kurang insentifnya aparat pengelola dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Jika jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut semakin banyak, maka akibatnya pendapatan asli daerah akan semakin tinggi.

Walaupun dalam prakteknya, peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, tetapi juga diperoleh dari pos-pos bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD), penerimaan dinas pendapatan daerah dan penerimaan dari pemerintah, tetapi penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah menjadi indikator utama. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya pendapatan menyebabkan kemampuan daerah untuk membiayai belanja modal pun turut semakin meningkat. Pemerintah daerah dikatakan memiliki pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi dari jumlah yang dianggarkan (*favourable variance*) dan sebaliknya (Mahmudi, 2006:137).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk

didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan masa manfaat, meningkatkan kualitas aset. Menurut Halim (2007:101) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Kecilnya penyerapan anggaran untuk belanja modal akan dapat mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Banyak proyek pembangunan infrastruktur daerah yang belum terlaksana dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah seharusnya memperbesar porsi alokasi belanja modal khususnya pada belanja modal bagian sektor publik seperti peralatan dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya realisasi belanja modal adalah infrastruktur yang ada tidak memadai dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menyebabkan para investor swasta nasional maupun investor asing enggan berinvestasi di daerah sehingga perekonomian daerah tersebut tidak berkembang yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan akan selalu bergantung dari APBN

dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian (Deskripsi dan Analisis APBD, 2014).

Hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Mukhtar Hakim (2015) Hasil yang didapat dari kajian ini (1) Efektivitas PAD Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2011-2015 berfluktuasi dan efisiensi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung membaik, (2) Rasio kemandirian daerah masih rendah, (3) Strategi prioritas utama yang di terapkan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan PAD adalah peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi PAD.

Hasil Penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Arbie gugus wandira (2013) menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

Hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Dwirandra dkk (2014). Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh

pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 terdapat beberapa fenomena yang terjadi di daerah yang ada di sumsel di antaranya terjadi fenomena peningkatan Pendapatan Asli Daerah namun tidak diikuti oleh Peningkatan Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan pada setiap daerah dengan adanya perbedaan kesiapan daerah dalam memasuki era otonomi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Penyebab Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tidak Mendorong Peningkatan Belanja Modal Secara Proporsional (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu Mengapa Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan sementara Belanja Modal tidak meningkat Secara Proporsional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor Penyebab Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak mendorong Peningkatan Belanja Modal secara Proporsional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang akan di capai pada penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti secara empiris berkaitan dengan penelitian akuntansi sektor publik khususnya tentang analisis faktor penyebab peningkatan PAD tidak mendorong peningkatan belanja modal secara proporsional

2. Bagi pemerintah provinsi

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui faktor penyebab peningkatan PAD terhadap belanja modal tidak mendorong peningkatan belanja modal secara proporsional

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai informasi, bahan pustaka dan ilmu pengetahuan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang yang berkaitan dengan PAD dan Belanja Modal Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbie, Gugus wandira (2013) Pengaruh PAD, DAU,DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal
- Ardhini, 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektik Teori Keagenan*. Jurnal hal 9-11: Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, Abdul (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul 2007, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Kurniati Tri Putri (2014) yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Belanja Modal
- Mahmudi, (2006) *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat
- Mukhtar Hakim (2015) yang berjudul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten kepulauan Anambas.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Putu Ngurah dan Dwirandra (2014) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi
- Siregar, Dr. Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung CV. Alfabeta
- Sujarweni, V.Wiratna (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Pustakabarupress
- Sujarweni, V.Wiratna (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Undang - undang No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Undang - undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.